

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan wawancara dan analisis mengenai implementasi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan studi kasus penanggulangan penyakit tidak menular berbasis Posbindu di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2016 maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dari isi penerapan kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Bantul belum berjalan secara efektif dan efisien karena dari keseluruhan perubahan yang tercapai dari tahun 2015-2016 hanya mencapai sekitar 3-4 persen saja tidak mengalami perubahan yang menunjukkan angka yang signifikan.
2. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dari isi pelaksanaan kebijakan atau konteks implementasi yang diterapkan di Kabupaten Bantul belum berjalan secara efektif dan efisien, hanya saja dalam hal sarana dan prasarana sudah cukup memadai tanpa kekurangan alat kesehatan.
3. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dari implementasi Permenkes Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dengan studi kasus

berbasis Posbindu PTM di Kabupaten Bantul yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu:

**a. Faktor Pendukung**

- (1) Kejelasan info dan peraturan kebijakan kesehatan terkait penanggulangan penyakit tidak menular antara Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan instansi dibawahnya mulai dari Provinsi DIY lalu Instansi Pemerintahan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
- (2) Tersedianya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai penunjang penyelenggaraan penanggulangan penyakit tidak menular melalui kegiatan Posbindu PTM di Kabupaten Bantul.
- (3) Tersedianya fasilitas kesehatan dalam melaksanakan penanggulangan penyakit tidak menular berbasis Posbindu PTM di Kabupaten Bantul dengan kondisi yang baik dan layak dipergunakan.

**b. Faktor Pemghambat**

- (1) Kurangnya sosialisasi yang diberikan terhadap masyarakat.
- (2) Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkuantitas.
- (3) Kurangnya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat terkait penanggulangan atau pencegahan dan pengendalian secara dini faktor resiko penyakit tidak menular yang berbasis kegiatan Posbindu PTM.
- (4) Tidak adanya penunjang atau insentif yang diberlakukan khususnya terhadap kader Posbindu.

- (5) Belum adanya SOP, regulasi, fragmentasi, format baku, dan indikator keberhasilan yang telah disahkan terkait program Posbindu PTM di Kabupaten Bantul.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya komunikasi antara implementor dengan publik lebih ditingkatkan dalam hal sosialisasi, sehingga minat dan kesadaran masyarakat terhadap program kegiatan memungkinkan lebih berjalan secara efektif, dan efisien.
2. Sebaiknya pemerintah menyediakan dana tersendiri sebagai penunjang insentif yang ditujukan oleh para kader Posbindu PTM, karena pada dasarnya masyarakat tidak hanya membutuhkan kesejahteraan secara jasmani dan rohani, tetapi masyarakat juga perlu kesejahteraan secara sosial dan ekonomi.
3. Sebaiknya segera menyusun SOP dan indikator keberhasilan terkait program Posbindu khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, mengingat beberapa daerah sudah memiliki SOP dan indikator keberhasilan terkait program tersebut walaupun belum adanya SOP dan indikator keberhasilan yang sah yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
4. Sebaiknya Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul selalu memperbaharui isi *website*, agar memudahkan masyarakat atau khalayak untuk mengakses data dan informasi pemerintahan khususnya aspek kesehatan.

